



Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAPPELITBANGDA

Jl. Urip Sumohardjo No. 269
Makassar, 90231

Phone : (0411) 453486
Instagram : bappelitbangdasulsel

**ee. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatukan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan sehingga terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan dikarenakan terjadi perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka dianggap perlu untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

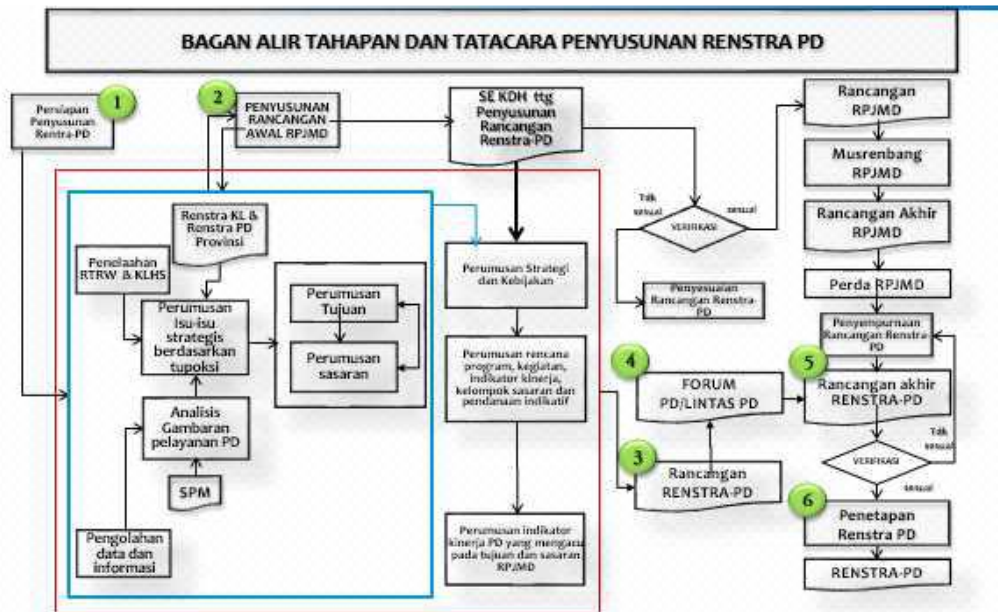
Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 periode pemerintahan atau 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Selain itu, Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat nasional maupun Kabupaten/Kota, yaitu dengan memperhatikan araha kebijakan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang dimana Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap tahunnya.

Adapun Renstra Perangkat Daerah juga dapat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra dan evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berikut bagan alur proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra, pada gambar 1 (Bagan Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD)



1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Perubahan BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 51);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 52);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen jangka menengah Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan

menjadi acuan penyusunan Renja PD sampai dengan tahun 2023. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJPD dan RPJMD;
- b. Memudahkan seluruh unit Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappelitbangda;
- c. Menyediakan indikator penilaian kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Sebagai dasar penyusunan Renja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang mengalami perubahan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas serta Renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, serta penentuan isu-isu strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi

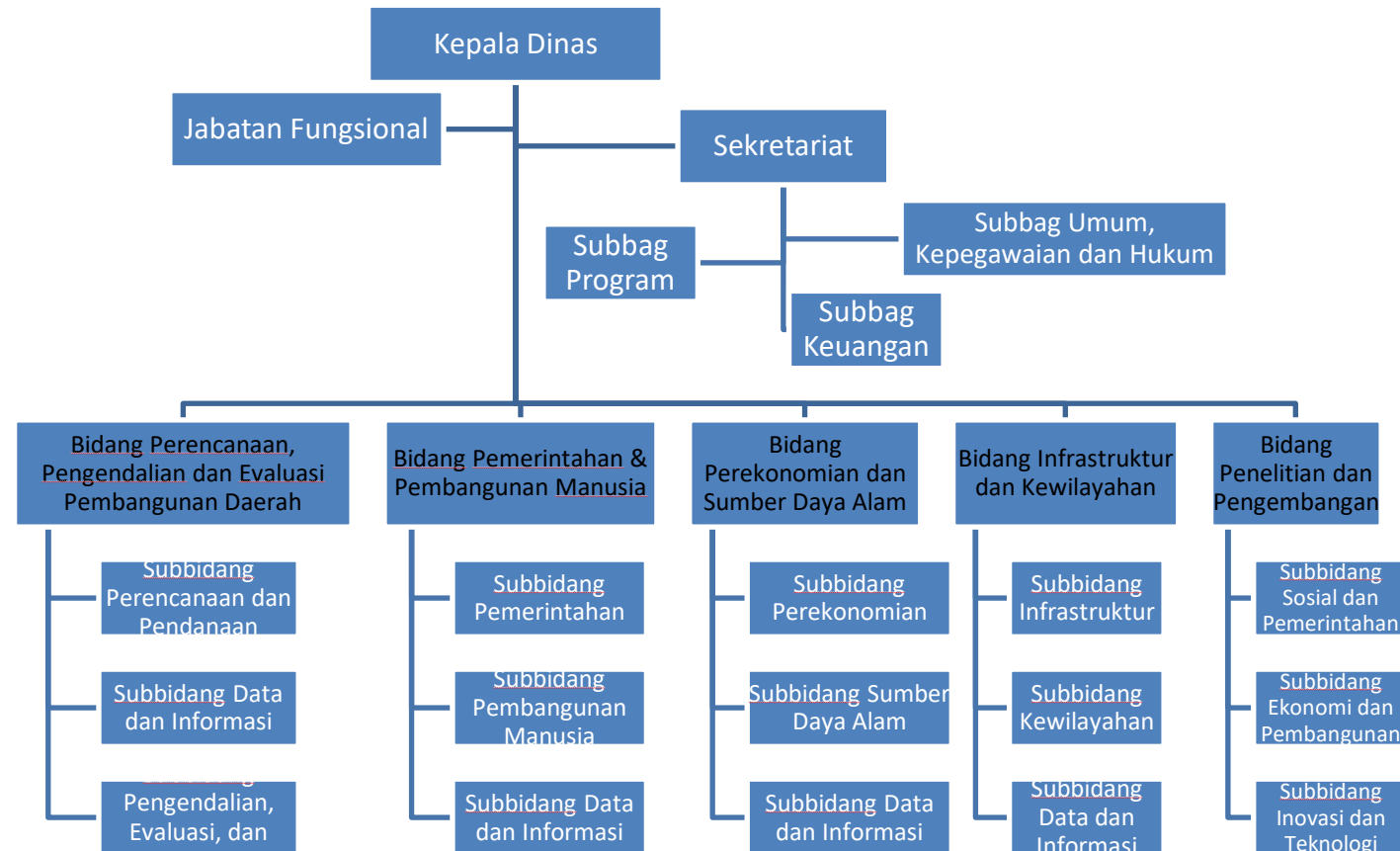
Selatan, yang antara lain menyatakan bahwasanya susunan organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian yang menjadi wewenang Daerah;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang terdiri atas :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pembangunan Manusia;
 3. Subbidang Data dan Informasi.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Kewilayahan; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

h. Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2019



Adapun dalam melaksanakan **tugas** membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah **Bappelitbangda mempunyai fungsi**, sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat bertugas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel. Adapun SOP internal tersebut diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bappelitbangda Provinsi Sulsel dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan pola tindakan yang sistematis.

2.2. SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. Agar dapat terciptanya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 23 Oktober 2020, jumlah pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

NO.	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat		3	4	13	7	6	13	46
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	1	3	8	3	13	29
3	Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1	1	3	5	5	9	24
4	Infrastruktur dan Kewilayahan			3	1	4	8	9	25
5	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		4	1	2	5	2	13	27
6	Penelitian dan Pengembangan		2	6	7	9	6	8	38
7	UPT Kebun Raya Pucak				1	1	1	4	7
TOTAL			11	16	30	39	31	69	196

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya hampir sepertiga jumlah pegawai Bappelitbangda lebih banyak pada rentang usia 50 tahun keatas. Untuk itu, didalam perencanaan penambahan jumlah pegawai dianggap perlu untuk menambah pegawai, agar pegawai-pegawai yang pensiunan nantinya dapat terstrukturisasi demi menunjang tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda.

Tabel 2.2 Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Golongan Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	29	37	66
Golongan III	56	46	102
Golongan II	19	6	25
Golongan I	3	-	-
TOTAL	110	90	200

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

Gambar 2.3 Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

NO	UNIT WILAYAH	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	13	27	5	46
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	12	16	29
3	Perekonomian dan Sumber Daya Alam		2	10	12	24
4	Infrastruktur dan Kewilayahan		2	14	9	25
5	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		1	15	11	27
6	Penelitian dan Pengembangan	2	5	21	10	38
7	UPT Kebun Raya Pucak		1	3	3	7
TOTAL		3	25	102	66	196

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

Dengan melihat tabel 2.2 dan 2.3 diatas, bahwsanya secara jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari wanita dan pegawai golongan III mendominasi kepegawaian yang ada sebesar 52% dan mayoritas pegawai bertempat di Sekretariat.

Gambar 2.4 Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

NO	UNIT WILAYAH	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH	
		SD	SMA	DIPLOMA	S1	S2		S3
1	Sekretariat	1	14	2	22	7	46	
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	2	8	17	1	29
3	Perekonomian dan Sumber Daya Alam		2		9	13		24
4	Infrastruktur dan Kewilayahan		2		9	14		25
5	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		2	3	6	16		27
6	Penelitian dan Pengembangan	2	4		22	10		38
7	UPT Kebun Raya Pucak		1	1	4	1		7
TOTAL		3	26	8	80	78	1	196

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

Dengan melihat tabel diatas, bahwasanya pegawai dengan tingkat pendidikan S1 mendominasi sebesar 41% dari total jumlah pegawai yang ada.

**Gambar 2.5 Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Peta Jabatan pada
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**

No.	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	0
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	21
4	Fungsional Tertentu (Ahli Terampil)	44
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	124
	Total	196

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

Berdasarkan peta jabatan, eselon 2 saat ini masih tidak ada yang mengisi dan diisi oleh Sekretaris Badan selaku pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Fungsional Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Golongan Tahun 2020**

No.	KETERANGAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Fungsional Perencana	21	6	-	-	27
2	Fungsional Arsiparis	2	5	-	-	7
3	Fungsional Peneliti	1	7	-	-	8
4	Fungsional Perakayasa		1			1
5	Fungsional Analisis Kebijakan	1				1
	Total	26	19	-	-	44

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappelitbangdaProv.Sulsel 2020

**Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Unit Kerja dan Jabatan Tahun 2020**

NO	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	24	22	46

NO	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17	12	29
3	Perekonomian dan Sumber Daya Alam	13	11	24
4	Infrastruktur dan Kewilayahan	13	12	25
5	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	15	12	27
6	Penelitian dan Pengembangan	18	20	38
7	UPT Kebun Raya Pucak	7	0	7
TOTAL		107	89	196

Berdasarkan unit kerja dan jenis kelamin, hampir seluruh unit kerja jumlah pegawai laki-laknya lebih tinggi, kecuali pada bidang penelitian dan pengembangan yang jumlah pegawainya perempuan lebih tinggi dibandingkan pegawai laki-laki.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Aset pada Bappelitbangda Prov Sulsel per 1 September 2020

a. Urusan Perencanaan

No.	Jenis Aset	Harga
1.	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rp. 14.011.211.155,-
2.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Rp. 6.102.667.000,-
3.	KIB D (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan)	Rp. 803.490.000,-
4.	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Rp. 1.329.397.850,-
5.	Kartu Inventaris Barang Aset Tak Berwujud	Rp. 1.001.237.000

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel
Tahun 2020

b. Urusan Penelitian dan Pengembangan

No.	Jenis Aset	Harga
1.	KIB A (Tanah)	Rp. 20.134.597.040,-
2.	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rp. 5.034.766.054,-
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Rp. 5.347.403.648,-
4.	KIB D (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan)	Rp. 540.509.700,-
5.	Kartu Inventaris Barang Aset Tak Berwujud	Rp. 277.265.000,-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel
Tahun 2020

Adapun untuk KIB D yaitu berupa jaringan e-planning, simonev dan lain-lain yang dikelola oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki mampu untuk mendukung kelancaran dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi), agar dapat menggantikan sarana dan prasana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.2.3. Instrumen Pendukung

Guna mendukung pencapaian target kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan instrument-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

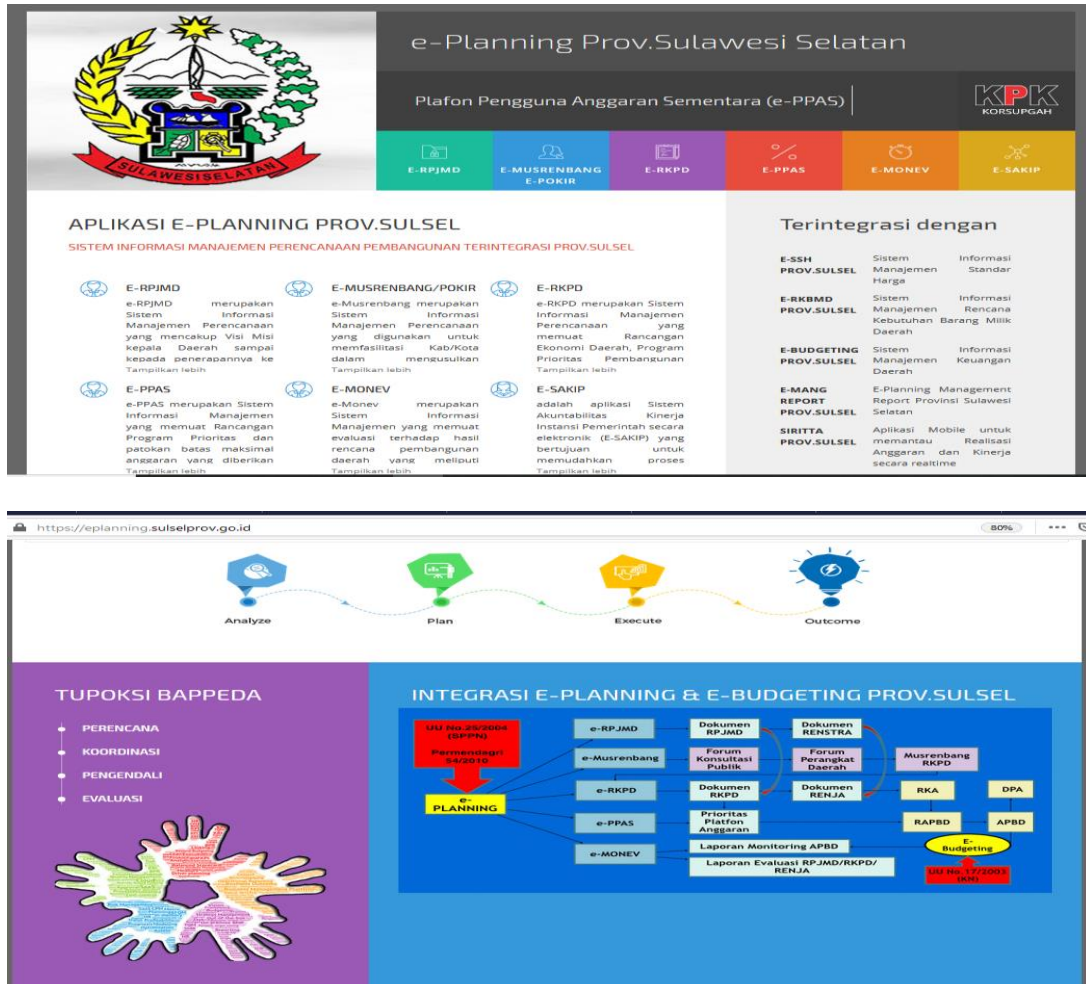
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka harus dapat dimanfaatkan dengan tepat. Hal tersebut sebagai peran dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta

membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selalu berbenah guna menangkap segala peluang yang dapat muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

A. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (<https://eplanning.sulselprov.go.id/>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan di Sulawesi Selatan, Sistem ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem anggaran, asset, laporan dan evaluasi. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai dengan saat ini telah mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, sejak penyusunan RPJMD sampai dengan KUA PPAS. Aplikasi ini pun selalu mengalami pengembangan dari tahun ke tahun, yang berdampak kepada kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Gambar 2.4 Aplikasi e-planning

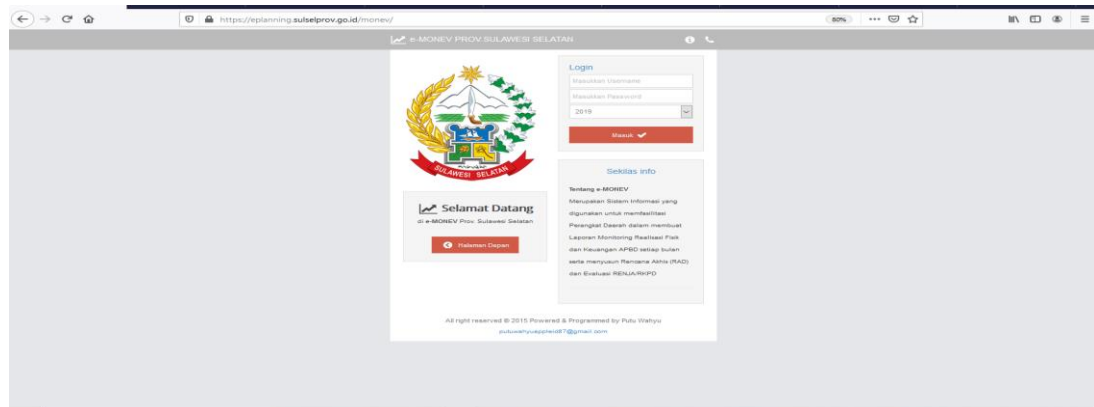


B. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang terdiri dari e-monev APBD, Penilaian Kinerja dengan alamat akses <https://eplanning.sulselprov.go.id/monev> yang terintegrasi dengan E-Sakip. Sistem informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerjanya. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu terdapat aplikasi siri'ta yang dapat

digunakan di *Mobile Phone* agar informasi pembangunan dapat dibuka kapan saja dan dimana saja.

Gambar 2.5 Aplikasi Simonev



Gambar 2.6 Aplikasi Siri'ta



2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah berupa :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
6. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2019 dan 2020;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 455/II/2019 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;
8. Penyusunan Perencanaan Kesejahteraan Sosial tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah dengan Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023;
9. Penghargaan Anugerah Iptek dan Inovasi (Penyelenggara oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI) pada Tahun 2019;

10. Penghargaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Berkinerja Utama (Penyelenggara oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI) pada Tahun 2019;
11. Pelaksanaan Governor Award For Innovation (GAFI) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
12. Juara Terbaik II Provinsi Lomba Inovasi Daerah “Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Pasar Tradisional” (Penyelenggara oleh Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020;
13. Juara Terbaik Provinsi Lomba Inovasi Daerah “Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Hotel (Penyelenggara oleh Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020;
14. Juara terbaik III Provinsi Lomba Inovasi Daerah “TataNAN Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Tempat Wisata (Penyelenggara oleh Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2020.

Gambaran kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut

Tabel T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

a. Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92,80 %	100 %	104	103	102	93,74	100
2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Kesesuaian prioritas pembangunan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

b. Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				100%	50%	53%	56%	24%	100%	50%	53%	56%	24%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah				34%	22%	29%	20%	49%	34%	22%	29%	20%	49%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah				13 %	12 %	13 %	22 %	50 %	13 %	12 %	13 %	22%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Tabel T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

a. Urusan Perencanaan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Belanja Langsung	Rp. 34.889.025.000	Rp. 31.995.593.832	Rp. 31.799.155.611	Rp. 38.209.478.991	Rp. 19.637.113.770	Rp. 33.143.738.065	Rp. 30.813.680.983	Rp. 30.511.796.170	Rp. 37.671.048.378	Rp. 19.317.736.126
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.202.056.000	Rp. 5.473.194.531	Rp. 5.327.906.854	Rp. 8.430.811.000	Rp. 5.752.208.630	Rp. 4.098.282.266	Rp. 5.276.508.158	Rp. 5.177.694.118	Rp. 8.215.198.860	Rp. 5.630.433.165
b.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Rp. 1.987.603.100	Rp. 2.428.950.000	Rp. 1.570.158.870	Rp. 2.235.015.491	Rp. 660.983.570	Rp. 1.440.127.700	Rp. 2.236.247.178	Rp. 1.543.867.150	Rp. 2.190.151.140	Rp. 624.858.876
c.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	Rp. 212.106.600	Rp. 174.516.450	Rp. 730.160.000	Rp. 220.000.000	Rp. 158.903.500	Rp. 211.125.515	Rp. 172.595.200	Rp. 701.478.650	Rp. 214.113.096	Rp. 126.537.854

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SKPD										
d.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 2.791.169.500	Rp. 3.096.163.707	Rp. 2.782.251.914	Rp. 3.380.215.000	Rp. 1.552.213.000	Rp. 2.727.439.760	Rp. 2.955.310.700	Rp. 2.654.744.400	Rp. 3.334.770.285	Rp. 1.487.139.043
e.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 23.299.789.850	Rp. 18.789.916.323	Rp. 14.354.749.010	Rp. 17.089.378.531	Rp. 7.772.691.009	Rp. 22.345.504.692	Rp. 18.273.290.408	Rp. 13.696.734.050	Rp. 16.910.366.673	Rp. 7.733.024.600
f.	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Rp. 2.396.299.950	Rp. 2.032.852.821	Rp. 2.155.575.944	Rp. 1.844.600.000	Rp. 675.600.000	Rp. 2.321.258.132	Rp. 1.899.729.339	Rp. 2.136.997.182	Rp. 1.820.352.174	Rp. 655.438.088
g.	Program Koordinasi Pembangunan	-	-	-	Rp. 5.009.458.969	Rp. 3.064.514.061	-	-	-	Rp. 4.986.096.150	Rp. 3.059.304.500

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.12

No.	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	95	96	96	99	98,4	31.306.073.441	30.291.599.944,40
a.	98	96	97	97	98	5.837.235.403	5.679.623.313
b.	72	92	98	98	95	1.776.542.206	1.607.050.409
c.	100	99	96	97	80	299.137.310	285.170.063
d.	98	95	95	99	96	2.720.402.624	2.631.880.838
e.	96	97	95	99	99	16.261.304.945	15.791.784.085
f.	97	93	99	99	97	1.820.985.743	1.766.754.983
g.	-	-	-	100	100	4.036.986.515	4.022.700.325

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

b. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun 2014-2018 (dlm Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2018 (dmln Jutaan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2018 (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)	(20)
. Belanja Daerah	13.614	14.637	14.773	17.756	16.836	13.461	14.278	14.624	16.947	16.404	98,88	97,55	98,99	95,44	97,43	5,86	5,29
. Belanja Tidak Langsung	4.734	5.362	5.513	6.111	7.989	4.603	5.092	5.450	5.839	7.692	97,23	94,96	98,86	95,55	96,28	14,42	14,13
. Belanja Langsung	8.880	9.275	9.260	11.645	8.847	8.858	9.186	9.174	11.108	8.711	99,75	99,04	99,07	95,39	98,46	1,50	0,77

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi paling rendah pada Tahun 2014 di komponen belanja langsung, yang dalam hal ini secara umum merupakan gaji pegawai yang dibayarkan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Fluktuasi target dan realisasi anggaran akibat dari efisiensi anggaran, terdapat sisa lenang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan dan peluang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
<p>a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;</p> <p>b. Secara kuantitas SDM Bappelitbangda sudah memadai</p> <p>c. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan</p>	<p>a. Kualitas SDM masih belum memadai</p> <p>b. Sarana prasana belum memadai</p> <p>c. Manajemen kinerja masih belum tepat</p> <p>d. Belum optimalnya pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja</p> <p>e. Koordinasi antar unit kerja masih lemah</p>

b. Analisis Lingkungan Eksternal

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/ Tantangan (Threats)</i>
Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Terdapatnya dukungan TIK yang modern	Perubahan Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis
Terdapat banyak pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
lembaga eksternal	memadai (penempatan kasubag program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan)
	Dukungan data dan Informasi dari Perangkat Daerah masih kurang guna penyusunan dokumen perencanaan

Selain hal tersebut, tantangan lain yang masih dihadapi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian) terkair dengan penyusunan perencanaan, kelitbangdan dan evaluasi daerah;
- b. Dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif untuk menjawab permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Kesenambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran belum optimal dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- d. Ketersediaan data dan informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khusus untuk proses perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan;
- g. Kurangnya koordinasi antar bidang di lingkup Bappelitbangda.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan pembangunan antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan sinergitas serta sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten/Kota dengan Provinsi;
- b. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan dengan *leading sector*;
- c. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
- d. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
- f. Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ditingkat kabupaten kota harus melalui Provinsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga target pembangunan Daerah dapat tercapai.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan bidang-bidang yang terdapat di Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

<i>Aspek</i>	<i>Permasalahan</i>
<i>Permasalahan dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ketersediaan data akurat yang kurang memadai</i> 2. <i>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal</i> 3. <i>Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan kab/kota;</i> 4. <i>Hasil evaluasi belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya</i> 5. <i>Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai</i>

<i>Aspek</i>	<i>Permasalahan</i>
<i>Permasalahan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan kab/kota;4. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya5. Kualitas perencana yang masih kurang memadai
<i>Permasalahan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal3. Kualitas perencana yang masih kurang memadai4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan kab/kota;5. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya6. Belum konsistennya antara rencana kerja dengan alur kas sehingga realisasi fisik dan keuangan tidak sinkron7. Data BPS untuk tahun N terbitnya tidak bersamaan dengan dokumen perencanaan.

<i>Aspek</i>	<i>Permasalahan</i>
<i>Permasalahan dalam Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya data sektoral yang menjadi penunjang perencanaan 2. Terdapat tumpang tindih fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 3. Belum tersedia standar baku pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian bidang Indawil; 4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan kab/kota;
<i>Permasalahan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan 2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah. 3. SDM peneliti (laki-laki dan perempuan) yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan.

Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Sulawesi Selatan, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain:

Tabel T-B 35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data	Ketersediaan data	- Lemahnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	terkini yang belum akurat	akurat yang kurang memadai	manajemen data - Perbedaan sumber data dan informasi
2.	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	Pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah belum optimal	- Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten - Ketersediaan analisa capaian kinerja belum optimal
3.	Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal, Kab/Kota dan Pusat	- Perbedaan waktu dan proses perencanaan di Pusat - Perencanaan anggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
4.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil- hasil penelitian untuk	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya	- Penelitian dan pengembangan yang sdh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan	dilaksanakan belum sepenuhnya dilaksanakan di OPD/ pemangku kepentingan - SDM dan fasilitas pendukung belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Proses telah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPELITBANGDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah:

**“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF,
KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”**

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sebagai berikut:

Inovatif adalah kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Kompetitif adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”

Produktif adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi yaitu sebagai berikut :

MISI	
MISI 1	: Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif
MISI 2	: Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel
MISI 3	: Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang

	produktif
MISI 4	: Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
MISI 5	: Meningkatkan produktivitas dan Saing Produk Sumber Daya berkelanjutan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan daerah menjadi sebagai motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan lebih menitikberatkan perannya dalam pencapaian **Misi Pertama** yaitu “**Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif**”.

Dengan berpedoman pada RPJMD, Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berupaya dengan meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan, dan juga memberikan informasi hasil kegiatan kelitbangan serta inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbangda untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa factor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel 3.1
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Bappelitbangda

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<p>a. Dukungan system perencanaan e-planning dan e-budgetting yang dimiliki pemprov sulsel</p> <p>b. Keterlibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</p>
2.	Belum optimalnya system data database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	<p>a. Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah terintegrasi dengan system penganggaran dan system pengendalian, monitoring dan evaluasi;</p> <p>b. Koordinasi yang telah terjalin dimulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan antara bidang-bidang di Bappelitbangda dengan</p>

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		leading sector.
3.	Berubah dan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah pusat	a. Setiap tahun, dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional dan daerah.
4.	Koordinasi yang belum maksimal dalam upaya mengoptimalkan hasil-hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan	a. Masyarakat dan Pemerintah Pusat yang mendukung terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah b. Alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang baik;
5.	Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	a. Komitmen pimpinan dan seluruh pejabat struktural terhadap seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Meningkatnya kedisiplinan melalui SKP dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja sesuai output yang dihasilkan c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023

Adapun berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan BAB 7, yang menyebutkan tujuan dan sasaran RPJMD dimana Bappelitbangda sebagai penanggung jawab dalam sasaran tersebut bersama dengan beberapa OPD lainnya (*Cross Cutting*), sebagai berikut :

Tabel 7.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

RPJMD Perubahan													
No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter													
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif													
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		B	BB (75)		BB		A		A		
	Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Provinsi		B	BB (76)		A		A		A		
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100	12,547,398,749.35	100	12,710,761,512.06	100	13,156,787,109.40	100	38,414,947,370.81	BAPPELITBANGDA
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		B	B (85)		A		A				
7	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	20	20		20		20		20		BAPPELITBANGDA

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun nasional. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dilakuakn telaah terhadap Renstra Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kabupaten/ Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran stratgis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam Renstra 2014-2019, sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari :a)Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; b) Rancangan Perpres RKP; dan 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L; dan
2. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas yaitu meningkatnya

kualitas tata Kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata Kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 *yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah*. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2015-2019 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain: 1) Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang professional; 2) Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007; 3) Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan 4) Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulsel berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Bappenas			
a.	% keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementerian memudahkan koordinasi
2.	Renstra Kemendagri			
a.	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum	Belum optimalnya koordinasi untuk	Dukungan pemerintah pusat terhadap penerapan

No.	Sasaran Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	dioptimalkan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah Prov Sulsel	memaksimalkan hasil-hasil penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	penelitian dan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah

3.3.3. Review Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/ Kota

Secara umum berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/ Kota, yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan. Berikut adalah identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulsel berdasarkan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan beserta penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulsel berdasarkan Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Menengah Renstra Kab/ Kota	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Kabupaten Pinrang			
a.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan dan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan	- Data mikro penunjang perencanaan yang berbasis	- Terciptanya komitmen antara Pemprov dan Kabupaten/K

No.	Sasaran Menengah Renstra Kab/ Kota	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	pengendalian pembangunan daerah	sektoral serta antara perencanaan program tingkat Provinsi dan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan (desa, kecamatan) masih terbatas - Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - ota - Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas yang mendukung perencanaan pembangunan dan	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ditingkat kabupaten kota harus melalui

No.	Sasaran Menengah Renstra Kab/ Kota	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	pengembangan inovasi daerah		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi
2.	Renstra Bappeda Kabupaten Takalar			
a.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat Provinsi dan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Data mikro penunjang perencanaan yang berbasis Kawasannya (desa, kecamatan) masih terbatas - Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya komitmen antara Pemprov dan Kabupaten/Kota - Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
b.	Mendorong peningkatan	Masih rendahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap perumusan

No.	Sasaran Menengah Renstra Kab/ Kota	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	dan penerapan hasil penelitian	kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ditingkat kabupaten kota harus melalui Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

Memperhatikan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam mensinkronkan serta mengharmonisasikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang.

3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2018-2023 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan serta merumuskan mitigasi atau alternative program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 6 (enam) indikator yang menjadi kewenangan Bappeda. Isu strategis Bappeda diantaranya sebagai berikut :

- Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari keterlibatan RTRW dan KLHS

No.	Telaahan	Permasalahan	Faktor
-----	----------	--------------	--------

		Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	Penghambat	Pendukung
a.	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Bappelitbangda Prov Sulsel pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
b.	Keterlibatan KLHS	- Dokumen perencanaan pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS	- Regulasi KLHS yang saling tumpang tindih antara Kemendagri dan KLHK dan belum adanya turunan dari PP tahun 2016	- Adanya regulasi tentang KLHS yang menegaskan kewajiban untuk penyusunan dokumen KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROV. SULSEL

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/Kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan dalam subab-subab sebelumnya sebagai berikut :

- Gambaran pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Kinerja pelayanan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai, ditambah dengan ketersediaan sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi.
- Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/ Lembaga
 - Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana Kerja K/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Provinsi Sulsel akan berdampak pada penyusunan nasional.
 - Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri
Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public.
- Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/ Kota;

Secara umum berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/ Kota, yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.

- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
Dalam perencanaan pembangunan, RTRW harus dijadikan sebagai acuan dikarenakan RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang merupakan sebuah pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang.
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang

terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.

6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta mampu bersaing dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Adapun perubahan-perubahan tersebut disusun dengan melalui tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *outcome* dan output.

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Suatu hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan merupakan pengejawantahan Sasaran. Dengan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan penggabungan 2 (dua) urusan dalam instansi Bappelitbangda, maka terdapat beberapa perubahan. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
<i>Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter</i>									
<i>Misi : Pemerintahan yang Berorientasi melayani, Inovatif dan Berkarakter</i>									
<i>Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan</i>									
<i>Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan</i>									
<i>Indikator Sasaran RPJMD : Nilai SAKIP Provinsi</i>									
1.	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	92%	94%	95%	96%	97%
				Nilai SAKIP OPD	80%	80%	80%	81%	83%
				% Persentase Temuan Material	-	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang	Prosentase keselarasan rencana pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RK PD	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
	berkualitas dan bersinergi	daerah	pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	96%	96,5%	97%
				Prosentase Indikator Program Pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%	92%	92%	92,5%	92,5%	93%
				Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran RPJMD : Berkembangnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public									
Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Pelayanan Publik									
3.			Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	-	-	20%	30%	40%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis

Bagaimana suatu organisasi Perangkat Daerah menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut dan pemeritahan pada umumnya. Mengumpulkan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan bermanfaat agar dapat menentukan langkah strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dengan tepat dan efisien. Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disusun formula strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti diagram formulasi SWOT berikut :

Faktor Eksternal	Peluang (O) : a. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah b. Terdapatnya dukungan TIK yang modern c. Terdapat banyak pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan lembaga eksternal	Tantangan (T): a. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis c. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai (penempatan kasubag program di PD belum sepenuhnya memahami Peraturan terkait Perencanaan) d. Dukungan data dan Informasi dari Perangkat Daerah masih kurang guna penyusunan dokumen perencanaan	
Faktor Internal	Kekuatan (S) a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; b. Secara kuantitas SDM (laki-laki dan perempuan) Bappelitbangda sudah memadai c. Secara kuantitas jumlah perempuan sekitar 45% dari jumlah laki-laki, dengan partisipasi kerja yang memadai d. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan e. Motivasi bekerja yang kuat	Alternatif Strategi (S-O): 1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	Alternatif Strategi (S-T): 1. Mendorong SDM (laki dan perempuan) aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan 2. Peningkatkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern 3. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023**

f. Sumber pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan tugas		
Kelemahan (W): a. Kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) masih belum memadai b. Sarana prasana belum memadai c. Manajemen kinerja masih belum tepat d. Belum optimalnya implementasi SOP dalam peningkatan kinerja e. Koordinasi antar unit kerja masih lemah	Alternatif Strategi (W-O): 1. Peningkatan Kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja.	Alternatif Strategi (W-T): 1. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dan antar tingkatan pemerintahan 2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Provinsi dan Kabupaten Kota.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan dalam tabel T.C 26 sebagai berikut:

Table T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1) Peningkatan kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan 2) Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	1. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (laki-laki dan perempuan) 2. Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	1. Peningkatan monitoring hasil evaluasi program-program pembangunan daerah melalui Simonev 2. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki agar bisa terintegrasi dengan sistem aplikasi dari luar.
		3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern	3. Membangun link antar sistem informasi yang berada di luar Bappelitbangda dan didalam Bappelitbangda
		4. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan	4. Mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan Universitas atau Kementerian terkait
		5. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Provinsi dan Kab/ Kota	5. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki 6. Menyempurnakan forum-forum perencanaan dengan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian dan Stakeholder terkait 7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pusat dan Stakeholder terkait

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah antar Tingkatan Pemerintahan	8. Menyusun Standar atau panduan dalam Verifikasi Dokumen Perencanaan 9. Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target Program/ Kegiatan RPJMD dan RKPD 10. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah
	3. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	6) Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	7. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana program dan kegiatan ditetapkan dan selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappelitbangda selama tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C.27.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	0.00	00	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,040,386,500.00	100 %	7,918,673,908.00	100 %	11,959,060,408.00	Sekretaris
			0.00	00	50		001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	21,600,000.00	12 Bulan	21,988,800.00	12 Bulan
			0.00	00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	42 Unit 14 Unit	13 Unit 36 Unit	15,000,000.00	15,270,000.00	13 Unit 56 Unit	30,270,000.00	
			0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	43 Orang	25 Orang	583,440,000.00	594,176,368.00	30 Orang	1,177,616,368.00	
			0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	25 Jenis ATK	25 Jenis ATK	248,002,000.00	252,466,036.00	25 Jenis ATK	500,468,036.00	
			0.00	00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5 Unit	9 Unit	35,000,000.00	35,630,000.00	12 Unit	70,630,000.00	
			0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	1,520,728,500.00	1,548,101,613.00	2 Jenis	3,068,830,113.00	
			0.00	00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan dalam Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	1 Pameran	167,299,000.00	170,310,382.00	2 Pameran	337,609,382.00	
			0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	424 Kali	2610 Kali	897,700,000.00	913,858,600.00	5860 Kali	1,811,558,600.00	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Nilai SAKIP OPD	0.00	00	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,348,305,420.00	100 %	3,379,913,700.00	100 %	6,728,219,120.00	Sekretaris
			0.00	00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	902,850,000.00	902,850,000.00	1 Unit	1,805,700,000.00	
			0.00	00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	415,616,400.00	415,616,400.00	13 Unit	831,232,800.00	
			0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	12 Unit	1,617,500,000.00	1,348,500,000.00	12 Unit	2,966,000,000.00	
			0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	346,500,000.00	440,000,000.00	8 Unit	786,500,000.00	
			0.00	00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	0.00	124,808,568.00	3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	124,808,568.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat	100%	100 %	1,146,985,480.00	100 %	931,702,000.00	100 %	2,078,687,480.00	Sekretaris
			0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	0	60 Orang	41,000,000.00	60 Orang	41,132,000.00	60 Orang	82,132,000.00	
			0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen	450,521,500.00	4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	451,611,892.00	8 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 14 Dokumen	450,521,500.00	
			0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	2 Laporan 1 Jenis	2 Laporan 1 Jenis	315,530,000.00	2 Laporan 1 Jenis	316,211,060.00	4 Laporan 1 Jenis	631,741,060.00	
			0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	233,290,000.00	3 Laporan	233,756,580.00	6 Laporan	467,046,580.00	
			0.00	00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000.00	2 Laporan	30,060,000.00	4 Laporan	60,060,000.00	
			0.00	00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,030,000.00	2 Laporan	30,030,000.00	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	99,700,000.00	100 %	356,226,000.00	100 %	455,926,000.00	Sekretaris
			0.00	00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	155 Orang 4 Laporan	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 8 Laporan	319,600,000.00	
			0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	155 Pasang	150 Pasang	123,000,000.00	170 Pasang	100,000,000.00	320 Pasang	223,000,000.00	
			0.00	00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	155 Pasang	150 Pasang	94,200,000.00	170 Pasang	94,200,000.00	320 Pasang	188,400,000.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)
			0.00	00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0 Orang	0.00	100 Orang	23,854,507.00	100 Orang	23,854,507.00	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	3.00	01	01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas)	100%	100 %		100 %		100 %		
		Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD							98.63%	100 %	10,747,395,000.00	100 %	8,779,439,223.00	100 %	19,526,834,223.00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%							96.69%	97 %		97.5 %		97.5 %		
			3.00	01	01	001	Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi	0 Dokumen	1 Dokumen	304,000,000.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	304,000,000.00	
			3.00	01	01	002	Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	
			3.00	01	01	003	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	344,000,000.00	2 Dokumen	344,000,000.00	4 Dokumen	688,000,000.00	
			3.00	01	01	004	Penyelenggaraan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Jumlah Usulan Musrenbang	0 Orang 0 Usulan	350 Orang 2500 Usulan	344,906,000.00	350 Orang 2550 Usulan	344,906,000.00	700 Orang 5050 Usulan	689,812,000.00	
			3.00	01	01	005	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e- Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-Planning Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang terpelihara, tersedia dan dimanfaatkan	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	155,200,000.00	52 Orang 1 Sistem	155,200,000.00	104 Orang 1 Sistem	310,400,000.00	
			3.00	01	01	006	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Fasilitasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Perencanaan	0 Fasilitasi 0 Fasilitasi	48 Fasilitasi 110 Fasilitasi	64,750,000.00	48 Fasilitasi 110 Fasilitasi	64,750,000.00	48 Fasilitasi 110 Fasilitasi	129,500,000.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)			
			3.00	01	01	007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data dan informasi dalam SIPD	0 Data	3077 Data	109,900,000.00	3077 Data	109,900,000.00	6154 Data	219,800,000.00	
			3.00	01	01	008	Forum Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi	Jumlah dokumen hasil Forum Regional Sulawesi	1 Dokumen	1 Dok Usulan	103,000,000.00	1 Dok Usulan	353,252,397.00	2 Dok Usulan	456,252,397.00	
			3.00	01	01	009	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan RPJMN/RPJPD dan Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota) Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPD (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota)	0 Dok 0 Dok 0 Dok	0 Dok 14 Dok 25 Dok	391,800,000.00	0 Dok 0 Dok 25 Dok	391,800,000.00	0 Dok 0 Dok 50 Dok	783,600,000.00	
			3.00	01	01	010	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	2 Laporan	515,825,000.00	2 Laporan	515,825,000.00	4 Laporan	1,031,650,000.00	
			3.00	01	01	011	Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasi, TP dan DAK	Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana Dekonsentrasi, TP dan DAK	2 Laporan	2 Laporan	195,000,000.00	2 Laporan	195,000,000.00	4 Laporan	390,000,000.00	
			3.00	01	01	012	Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan	Jumlah OPD yang diasistinsi Rencana Kebutuhannya Anggarannya	52 OPD	52 OPD	5,000,000.00	52 OPD	5,000,000.00	52 OPD	10,000,000.00	
			3.00	01	01	013	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)	Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	144,200,000.00	1 Aplikasi	144,200,000.00	1 Aplikasi	288,400,000.00	
			3.00	01	01	015	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan disepakati	2 Dokumen	2 Dokumen	467,700,000.00	2 Dokumen	400,000,000.00	4 Dokumen	867,700,000.00	
			3.00	01	01	016	Pengumpulan updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	0 Informasi	5000 informasi	108,000,000.00	5000 informasi	108,000,000.00	10.000 informasi	216,000,000.00	
			3.00	01	01	017	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan APBD, Dekon, TP, dan DAK	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen APBD Provinsi Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi penyelenggaraa n Dekosentrasi Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi penyelenggaraan DAK (24	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	193,500,000.00	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	193,500,000.00	8 Dok 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan	387,000,000.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)			
			3.00	01	01	019	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra opd yg di evaluasi (56 Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja opd yg di evaluasi (56 Perangkat Daerah)	56 OPD 56 OPD	56 OPD	87,000,000.00	0 OPD 56 OPD	87,000,000.00	56 OPD 56 OPD	174,000,000.00	
			3.00	01	01	020	Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Badan/Lembaga Luar Negeri	Jumlah dokumen evaluasi kerjasama antar daerah dan Badan/Lembaga Jumlah dokumen hasil evaluasi dalam negeri /badan/lembaga luar negeri	1 Laporan 1 Dok	1 Laporan 1 Dok	258,000,000.00	1 Laporan 0 Dok	258,000,000.00	2 Laporan 1 Dok	516,000,000.00	
			3.00	01	01	021	Penyusunan Grand Desain Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen grand desain kerjasama daerah	0 Dok	0 Dok	0.00	1 Dok	148,809,058.00	1 Dok	148,809,058.00	
			3.00	01	01	022	Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan	Rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi	0 Dok	12 dokumen	6,979,817,000.00	12 dokumen	8,279,817,000.00	24 dokumen	15,259,634,000.00	
Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	3.00	01	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pembangunannya (Prioritas)	0 Kawasan	3 Kawasan	1,505,175,271.00	3 Kawasan	690,872,388.00	6 Kawasan	2,196,047,659.00	
			3.00	01	02	001	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pengembangan pusat pertumbuhan Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 rekomendasi 4 rekomendasi	164,000,000.00	4 rekomendasi 4 rekomendasi	164,459,237.00	8 rekomendasi 8 rekomendasi	328,459,237.00	
			3.00	01	02	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus	Jumlah Laporan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus	1 Laporan	1 laporan	178,640,000.00	1 laporan	179,015,144.00	2 laporan	357,655,144.00	
			3.00	01	02	003	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Industri	1 Laporan	1 Laporan	113,000,000.00	1 Laporan	113,237,300.00	2 Laporan	226,237,300.00	
			3.00	01	02	004	Perencanaan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Perdagangan	1 Laporan	1 Laporan	120,670,000.00	1 Laporan	120,923,407.00	2 Laporan	241,593,407.00	
			3.00	01	02	005	Perencanaan Pengembangan Sektor pariwisata	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Sektor Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	113,000,000.00	1 Laporan	113,237,300.00	2 Laporan	226,237,300.00	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	3.00	01	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	1,315,000,000.00	10 Rekomendasi	970,469,705.00	20 Rekomendasi	2,285,469,705.00	Bidang PPM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)		
			3.00	01	03	001	Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Gerakan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan	1 Dokumen	1 Dokumen	122,400,000.00	1 Dokumen	122,678,947.60	2 Dokumen	122,400,000.00
			3.00	01	03	002	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development Goals (SDGs) yang disusun	25 Rencana Aksi	24 Rencana Aksi	353,000,000.00	24 Rencana Aksi	353,763,207.60	24 Rencana Aksi	353,000,000.00
			3.00	01	03	003	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	68,600,000.00	2 Dokumen	68,765,967.60	4 Dokumen	137,365,967.60
			3.00	01	03	004	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000.00	2 Dokumen	125,284,407.60	4 Dokumen	250,284,407.60
			3.00	01	03	005	Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	67,600,000.00	3 Dokumen	67,763,867.60	6 Dokumen	135,363,867.60
			3.00	01	03	006	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan pendidikan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	136,200,000.00	2 Dokumen	136,507,927.60	4 Dokumen	272,707,927.60
			3.00	01	03	007	Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov Sulse	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov. Sulse	2 Dokumen	2 Dokumen	95,000,000.00	2 Dokumen	95,221,407.60	4 Dokumen	190,221,407.60
			3.00	01	03	008	Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota Layak anak	Jumlah kabupaten/kota layak anak yang dibina	0 Kab/Kota	2 Kab/Kota	108,400,000.00	2 Kab/Kota	108,649,547.60	2 Kab/Kota	217,049,547.60
			3.00	01	03	009	Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah terkait Pemerintahan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	129,400,000.00	1 Dokumen	129,693,647.60	4 Dokumen	259,093,647.60
			3.00	01	03	010	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan/ Program Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	2 Dokumen	109,400,000.00	2 Dokumen	109,400,000.00	4 Dokumen	218,800,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	3.00	01	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	8 Rekomendasi	849,790,000.00	8 Rekomendasi	2,119,386,112.00	16 Rekomendasi	2,969,176,112.00	Bidang Perekonomian
			3.00	01	04	001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	320,240,000.00	1 Dokumen	323,437,429.00	2 Dokumen	643,677,429.00	
			3.00	01	04	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	1 Laporan	1 Laporan	72,000,000.00	1 Laporan	74,676,125.00	2 Laporan	146,676,125.00	
			3.00	01	04	003	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro	Jumlah Laporan capaian indikator makro	1 Laporan	1 Laporan	9,800,000.00	1 Laporan	12,345,505.00	2 Laporan	22,145,505.00	
			3.00	01	04	005	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	1 Laporan	1 Laporan	92,500,000.00	1 Laporan	95,219,175.00	2 Laporan	187,719,175.00	
			3.00	01	04	009	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	118,000,000.00	1 Laporan	120,772,725.00	2 Laporan	238,772,725.00	
			3.00	01	04	010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Laporan	1 Laporan	108,250,000.00	1 Laporan	111,002,250.00	2 Laporan	219,252,250.00	
			3.00	01	04	011	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Perkebunan	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan dan Pengendalian Sektor	1 Laporan	1 Laporan	104,000,000.00	1 Laporan	106,743,325.00	2 Laporan	210,743,325.00	
			3.00	01	04	012	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Peternakan	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan dan Pengendalian Sektor	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	102,734,925.00	2 Laporan	202,734,925.00	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	3.00	01	05		PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	282,960,600.00	4 Rekomendasi	349,649,729.00	8 Rekomendasi	632,610,329.00	
		Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan						Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		8 Rekomendasi		
			3.00	01	05	003	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH	2 Laporan	2 Laporan	210,300,000.00	2 Laporan	210,723,376.20	4 Laporan	421,023,376.20	
			3.00	01	05	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam dokumen perencanaan daerah	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	72,660,600.00	4 Rekomendasi	72,878,581.80	8 Rekomendasi	145,539,181.80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)			
					Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPRK	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi			4 Rekomendasi		8 Rekomendasi				
Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	3.00	01	06	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam dokumen Perencanaan	6 Rekomendasi	4 Rekomendasi			4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	10,308,890,000.00	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW				Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Rekomendasi	4 Rekomendasi			4 Rekomendasi	8 Rekomendasi				
			3.00	01	06	001	Koordinasi Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi	Jumlah laporan rekomendasi pelaksanaan dan keterpaduan pembangunan PPAS	3 Dokumen	3 Dokumen	172,350,000.00	2 Dokumen	172,867,050.00	5 Dokumen	345,217,050.00	
			3.00	01	06	004	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah rekomendasi pembangunan jalan daerah terisolir	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi			3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	332,417,444.00	
		Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Jalan						3 Rekomendasi	3 Rekomendasi			3 Rekomendasi	6 Rekomendasi			
		Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan jembatan						4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	165,960,000.00		4 Rekomendasi	8 Rekomendasi			
		Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui PHID						0	0 Rekomendasi			4 Rekomendasi	4 Rekomendasi			
			3.00	01	06	005	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP	Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi			2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	7,837,250,000.00	
		Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK						4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	3,923,000,000.00		4 Rekomendasi	8 Rekomendasi			
			3.00	01	06	006	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPSIP	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi			4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	348,722,300.00	
		Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Irigasi						3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	174,100,000.00		3 Rekomendasi	6 Rekomendasi			
		Jumlah rekomendasi penanggulangan potensi banjir						4 Rekomendasi	4 Rekomendasi			4 Rekomendasi	8 Rekomendasi			
			3.00	01	06	008	Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah rekomendasi peningkatan capaian tatanan kab/kota sehat	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	88,700,000.00	4 Rekomendasi	88,966,100.00	8 Rekomendasi	177,666,100.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)			
			3.00	01	06	009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi perencanaan sektor pengembangan wilayah	3 Laporan	3 Laporan	92,030,000.00	3 Laporan	92,306,090.00	6 Laporan	184,336,090.00	
			3.00	01	06	010	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola	1 Sistem	1 Sistem	130,100,000.00	1 Sistem	130,490,300.00	1 Sistem	260,590,300.00	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	3.00	04	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	20%	20 %	5,754,764.00	20 %	871,730,142.00	40 %	877,484,906.00	Bidang Litbang
			3.00	04	01	001	Science Techno Park (STP) Berbasis Pertanian	Jumlah STP Berbasis	0	1 STP	400,000,000.00	1 STP	402,000,000.00	1 STP	802,000,000.00	
			3.00	04	01	002	Science Techno Park (STP) Berbasis Kehutanan	Jumlah STP Berbasis Kehutanan	0	1 STP	800,000,000.00	1 STP	804,000,000.00	1 STP	1,604,000,000.00	
			3.00	04	01	003	Penguatan Kluster Inovasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah	0	1 Rekomendasi 5 Produk	230,000,000.00	1 Rekomendasi 5 Produk	230,000,000.00	2 Rekomendasi 10 Produk	460,000,000.00	
			3.00	04	01	006	Pekan Inovasi Sulawesi Selatan	Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah Jumlah Artikel Seminar Kelitbangan Jumlah Inkubator Bisnis Teknologi Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah	0	30 booth 10 artikel 5 inkubator 0 booth	470,000,000.00	30 booth 10 artikel 5 inkubator 0 booth	470,000,000.00	60 booth 20 artikel 10 inkubator 0 booth	940,000,000.00	
			3.00	04	01	008	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel	Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	256,014,800.00	1 rekomendasi	256,941,555.46	1 rekomendasi	512,956,355.46	
			3.00	04	01	009	Laboratorium Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah	20 %	20 % 50 %	300,000,000.00	20 % 60 %	300,000,000.00	20 % 60 %	600,000,000.00	
			3.00	04	01	011	Governors Award	Jumlah OPD Provinsi/Lembaga Vertikal Berprestasi Jumlah Kab./kota Berprestasi Jumlah Lembaga Non Pemerintah Berprestasi Jumlah Peserta Launching Buku Inovasi	0	3 OPD/lembaga 3 Kab /Kota 3 lembaga 100 orang	250,000,000.00	3 OPD/lembaga 3 Kab /Kota 3 lembaga 100 orang	250,000,000.00	6 OPD/lembaga 6 Kab /Kota 6 lembaga 200 orang	500,000,000.00	
								Jumlah Produk Inkubator Inovasi		2 produk				4 produk		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)
			3.00	04	01	013	Pengembangan Inkubator Inovasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Inkubator Inovasi	0	0 rekomendasi	350,000,000.00	0 rekomendasi	350,000,000.00	0 rekomendasi	700,000,000.00	
			3.00	04	01	014	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	Jumlah Kebun Raya	1 Kebun Raya	1 Kebun Raya	1,968,465,000.00	1 Kebun Raya	1,878,700,196.00	1 Kebun Raya	3,847,165,196.00	
Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbang	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatannya	Jumlah kebijakan hasil kelitbang dan pemanfaatan iptek daerah	3.00	04	02		PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbang dan pemanfaatan iptek daerah	8 Rekomendasi	9 Rekomendasi	2,491,090,000.00	9 Rekomendasi	2,894,818,300.00	18 Rekomendasi	5,385,908,300.00	Bidang Litbang
			3.00	04	02	002	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi	50 Spesies	100 pohon 50 Spesies	150,000,000.00	200 pohon 50 Spesies	150,000,000.00	300 pohon 100 Spesies	300,000,000.00	
			3.00	04	02	003	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi	Jumlah Tumbuhan	50 Spesies	50 Spesies	100,000,000.00	60 Spesies	100,000,000.00	110 Spesies	200,000,000.00	
			3.00	04	02	004	Penelitian Peningkatan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan	0	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	005	Penelitian Peningkatan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan	0	1 rekomendasi	150,000,000.00	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	007	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	2 rekomendasi	250,000,000.00	
			3.00	04	02	008	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research Isu-isu Strategis Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Peraturan/Program Pemerintah Daerah	0	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100,000,000.00	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100,000,000.00	2 rekomendasi 2 rekomendasi	200,000,000.00	
			3.00	04	02	009	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMDES	0	1 rekomendasi	100,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	2 rekomendasi	250,000,000.00	
			3.00	04	02	010	Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Outbound Activity Jumlah Peserta Tour Wisata Edukasi Jumlah Hasil Riset Ilmiah Terbaik dari Hasil Lomba Riset Ilmiah Jumlah Peserta Launching JAMBORE IPTEK Tahun 2019	0	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 100 orang	300,000,000.00	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 0 orang	300,000,000.00	200 orang 200 orang 3 Riset Ilmiah 100 orang	600,000,000.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)		
					Jumlah Data dan Informasi Bahan Masukan Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sulsel Tahun 2020		0 data dan informasi			0 data dan informasi		0 data dan informasi			
			3.00	04	02	011	Penelitian Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan	0	1 rekomendasi	200,000,000.00	1 rekomendasi	200,000,000.00	2 rekomendasi	400,000,000.00
			3.00	04	02	012	Penelitian Kebijakan Sosial dan Pengembangan Karakter	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesehatan Preventif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Vokasional	0	0 rekomendasi 0 rekomendasi 0 rekomendasi 1 rekomendasi	200,000,000.00	0 rekomendasi 0 rekomendasi 1 rekomendasi 0 rekomendasi	200,000,000.00	0 rekomendasi 0 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi	200,000,000.00
			3.00	04	02	013	Peningkatan Kualitas Kelitbang Utama	Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM) Jumlah Rancangan Kelitbang Rekomendasi Majelis Pertimbangan Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset	0	4 sidang 2 rancangan 4 rancangan	347,200,000.00	4 sidang 2 rancangan 4 rancangan	347,200,000.00	8 sidang 4 rancangan 8 rancangan	694,400,000.00
			3.00	04	02	014	Rapat Koordinasi (rakor) Kelitbang	Jumlah Rekomendasi Perumusan Perencanaan Kelitbang Tahunan Jumlah Data dan Informasi Bahan Masukan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbang	0	1 rekomendasi 0 data dan informasi	200,000,000.00	1 rekomendasi 0 data dan informasi	200,000,000.00	2 rekomendasi 0 data dan informasi	400,000,000.00
			3.00	04	02	015	Penelitian Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil	0	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)	(20)			
			3.00	04	02	016	Penelitian Pengembalian Keajaiban Jeruk Selayar di Sulsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembalian Keajaiban Jeruk Selayar	0	1 rekomendasi	150,000,000.00	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	017	Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan	0	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	018	Penerapan Teknologi Adaptif untuk Peningkatan Produktivitas Kakao di Sulsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Kakao di Sulsel	0	1 rekomendasi	150,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	2 rekomendasi	300,000,000.00	
			3.00	04	02	019	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas di Sulsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas	0	1 rekomendasi	150,000,000.00	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	020	Penelitian Peningkatan Potensi dan Animo Masyarakat dalam Pengembangan dan Peningkatan Produksi Sagu di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Produksi Sagu	1 rekomendasi	1 rekomendasi	150,000,000.00	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
			3.00	04	02	021	Kajian Penggunaan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengembangan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan	0	0 rekomendasi	0.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	1 rekomendasi	150,000,000.00	
Grandtotal																
									30,295,822,435.00			28,327,537,926.00				

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27

(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan								(20)	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	38,133,685,515	100%	44,724,749,308.35	100%	46,860,021,529.80	100%	129,718,456,353.15	Bappelitbangda
			Nilai SAKIP OPD		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%		100%		100%		100%		
			% Persentase Nilai Temuan Material		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%		100%		100%		100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	744,612,836.00	100%	872,674,629.35	100%	1,058,956,216.16	100%	2,676,243,681.51	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	3 dokumen	197,898,512.00	2 dokumen	210,000,000.00	2 dokumen	250,000,000.00	7 dokumen	657,898,512.00	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang	4 dokumen	4 dokumen	150,520,100.00	4 dokumen	190,000,000.00	4 dokumen	270,564,753.22	12 dokumen	611,084,853.22	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	8 Laporan	8 Laporan	396,194,224.00	8 Laporan	472,674,629.35	8 Laporan	538,391,462.94	24 Laporan	1,407,260,316.29	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	32,063,781,907.00	100%	38,283,781,907.00	100%	39,571,058,940.84	100%	109,918,622,754.84	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	100%	100%	31,581,347,247.00	100%	37,781,347,247.00	100%	39,141,058,940.84	100%	108,503,753,434.84	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari : - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/ SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	- 12 Dokumen	- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	371,226,736.00	- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	381,226,736.00	- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	300,000,000.00	- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	1,052,453,472.00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	111,207,924.00	0 laporan		12 laporan	130,000,000.00	36 laporan	241,207,924.00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	2 laporan	0 laporan	0.00	1 laporan	121,207,924.00	0 laporan	0.00	1 laporan	121,207,924.00	
				Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang undangan	100%	100%	128,741,524.00	100%	129,741,524.00	100%	130,000,000.00	100%	388,483,048.00	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 laporan RKBMD	2 laporan RKBMD	17,021,500.00	2 laporan RKBMD	18,021,500.00	2 laporan RKBMD	60,000,000.00	6 Laporan RKBMD	95,043,000.00	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	111,720,024.00	3 Laporan	111,720,024.00	3 Laporan	70,000,000.00	9 Laporan	293,440,048.00	

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD								PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		100	578,828,048.00	100	629,828,048.00	100	692,810,852.80	100	1,901,466,948.80	
				Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	155 pasang	200 pasang	167,936,500.00	210 pasang	188,936,500.00	215 pasang	207,830,150.00	625 pasang	564,703,150.00	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaian	155 pegawai	200 pegawai	124,189,024.00	210 pegawai	134,189,024.00	215 pegawai	147,607,926.40	625 pegawai	405,985,974.40	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas	100%	100%	173,592,324.00	100%	173,592,324.00	100%	190,951,556.40	100%	538,136,204.40	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	155 pegawai	200 pegawai	113,110,200.00	210 pegawai	133,110,200.00	215 pegawai	146,421,220.00	625 pegawai	392,641,620.00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	1,700,979,308.00	100%	1,740,979,308.00	100%	1,915,077,238.80	100%	5,357,035,854.80	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	2 unit	12 unit	150,054,524.00	12 unit	150,054,524.00	12 unit	165,059,976.40	36 unit	465,169,024.40	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	2 unit	12 unit	153,956,336.00	12 unit	153,956,336.00	12 unit	169,351,969.60	36 unit	477,264,641.60	
				Penyediaan Bahan/Material	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	100%	100%	105,777,000.00	100%	135,777,000.00	100%	149,354,700.00	100%	390,908,700.00	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	800 orang	300 orang	304,995,024.00	350 orang	304,995,024.00	380 orang	335,494,526.40	730 orang	945,484,574.40	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	0 kali	60 kali	986,196,424.00	70 kali	996,196,424.00	80 kali	1,095,816,066.40	180 kali	3,078,208,914.40	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	960,565,700.00	100%	1,080,565,700.00	100%	1,136,622,270.00	100%	3,177,753,670.00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 kendaraan roda dua			2 kendaraan roda dua	80,000,000.00	2 kendaraan roda dua	80,000,000.00	6 kendaraan roda dua	160,000,000.00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan				1 kendaraan dinas roda dua	40,000,000.00			1 kendaraan dinas roda empat dan 1 kendaraan dinas roda dua	40,000,000.00	
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	1 jenis	1 jenis	108,509,100.00	1 jenis	108,509,100.00	1 jenis	119,360,010.00	1 jenis	336,378,210.00	
				Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	158,629,000.00	100%	158,629,000.00	100%	174,491,900.00	100%	491,749,900.00	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	693,427,600.00	100%	693,427,600.00	100%	762,770,360.00	100%	2,149,625,560.00	
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	23,000,000.00	100%	24,000,000.00	100%	190,500,000.00	100%	237,500,000.00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	18,000,000.00	12 bulan	19,000,000.00	12 bulan	180,000,000.00	12 bulan	217,000,000.00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun	5,000,000.00	1 tahun	5,000,000.00	1 tahun	10,500,000.00	1 tahun	20,500,000.00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	1,933,176,192.00	100%	1,963,178,192.00	100%	2,164,996,011.20	100%	6,061,350,395.20	

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	16 unit 12 unit 4 unit	16 unit 470,106,024.00 4 unit	16 unit 490,106,024.00 4 unit	16 unit 539,116,626.40 4 unit	16 unit 12 unit 4 unit	1,499,328,674.40				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan	4 unit 2 unit 2 unit	4 unit 182,877,524.00 1 unit	4 unit 192,877,524.00 2 unit	4 unit 212,165,276.40 2 unit	4 unit 3 unit 2 unit	587,920,324.40				
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	1 jenis	162,771,024.00	1 jenis	179,048,126.40	1 jenis	504,590,174.40				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	672,535,596.00	2 gedung	745,289,155.60	2 gedung	2,090,360,347.60				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	444,886,024.00	10 jenis	489,376,826.40	10 jenis	1,379,150,874.40				
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKP Tingkat konsistensi program RKPd kedalam APBD Presentase Capaian Program Pembangunan Daerah dengan tingkat Capaian hasil (Outcome) minimal 75%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd dan APBD Persentase peningkatan capaian kinerja program	100% n/a	100% 0,5%	14,241,588,156.00	100% 0,5%	14,591,598,156.00	100% 0,5%	15,713,198,815.00	100% 0,5%	44,546,385,127.00	Bappelitbangda	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	100%	2,892,745,848.00	100%	3,112,745,848.00	100%	3,512,745,848.00	100%	9,518,237,544.00		
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	531,708,524.00	1 Dokumen	651,708,524.00	1 Dokumen	951,708,524.00	10 Dokumen	2,135,125,572.00		
				Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	2 Dokumen	2,361,037,324.00	2 Dokumen	2,461,037,324.00	2 Dokumen	2,561,037,324.00	11 Dokumen	7,383,111,972.00		
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	370,984,024.00	100%	390,984,024.00	100%	430,984,024.00	100%	1,192,952,072.00		

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	3077	2077	370,984,024.00	2077	390,984,024.00	2077	430,984,024.00	15385	1,192,952,072.00	
					Jumlah sistem yang dipelihara	2 sistem	2 sistem		2 sistem		2 sistem		2 sistem		
					Jumlah kab/kota yang dibina	24 Kab/Kota	24 kab/kota		24 kab/kota		24 kab/kota		24 kab/kota		
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	10,977,858,284.00	100%	11,087,868,284.00	100%	11,769,468,943.00	100%	33,835,195,511.00	
					Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	n/a	24 kab/kota		24 kab/kota		24 kab/kota		24 kab/kota		
				Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi RPJPD dengan RPJMN	0 Dokumen	0	9,430,163,224.00	0	9,430,173,224.00	1 Dokumen	9,530,173,224.00	1 Dokumen	28,390,509,672.00	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
					Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		36 dokumen		
				Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan	4 Laporan	1,141,889,036.00	4 Laporan	1,151,889,036.00	4 Laporan	1,633,489,695.00	4 Laporan	3,927,267,767.00	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan		
				fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Fasilitasi (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	24 rekomendasi	24 rekomendasi	405,806,024.00	24 rekomendasi	505,806,024.00	24 rekomendasi	605,806,024.00	24 rekomendasi	1,517,418,072.00	
			Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	n/a	60	1,799,879,684.00	80.00	1,975,716,218.63	100.00	2,195,716,218.63	100%	5,971,312,121.26	Bidang PPM, Bappelitbangda
					% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	n/a	80%	1,707,257,472.00	90%	1,877,983,219.20	95%	2,065,781,541.12	95%	5,651,022,232.32	Bidang Ekonomi dan SDA, Bappelitbangda
					% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	90%	7,302,373,296.00	90%	5,015,818,495.69	95%	5,475,000,000.00	95%	17,793,191,791.69	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappelitbangda
								10,809,510,452.00		8,869,517,933.52		9,736,497,759.75			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan		5 Rekomendasi	538,984,124.00	5 Rekomendasi	551,000,000.00	5 Rekomendasi	611,000,000.00	15 Rekomendasi	1,700,984,124.00	
					Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8 Jumlah data dan informasi	581,297,036.00	8 Jumlah data dan informasi	612,716,218.63	8 Jumlah data dan informasi	712,716,218.63	24 Jumlah data dan informasi	1,906,729,473.26	

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		7 Rekomendasi	679,598,524.00	7 Rekomendasi	812,000,000.00	7 Rekomendasi	872,000,000.00	21 Rekomendasi	2,363,598,524.00	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	206,609,300.00	1 Rekomendasi	210,000,000.00	1 Rekomendasi	250,000,000.00	3 Rekomendasi	666,609,300.00	
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	182,240,012.00	1 Dokumen	193,960,100.00	1 Dokumen	213,960,100.00	3 Dokumen	590,160,212.00	
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	332,374,824.00	4 Rekomendasi	341,000,000.00	4 Rekomendasi	361,000,000.00	12 Rekomendasi	1,034,374,824.00	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	502,849,512.00	3 Rekomendasi	602,000,000.00	3 Rekomendasi	622,000,000.00	9 Rekomendasi	1,726,849,512.00	
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	399,057,024.00	1 Dokumen 2 Dokumen	418,756,118.63	1 Dokumen 2 Dokumen	498,756,118.63	3 Dokumen 6 Dokumen	1,316,569,261.26	
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	176,749,012.00	4 Rekomendasi	210,000,000.00	4 Rekomendasi	250,000,000.00	12 Rekomendasi	636,749,012.00	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian		7 Rekomendasi	593,664,724.00	7 Rekomendasi	653,031,196.40	7 Rekomendasi	718,334,316.04	21 Rekomendasi	1,965,030,236.44	
					Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA		10 Jumlah Data dan Informasi	389,149,324.00	10 Jumlah Data dan Informasi	428,064,256.40	10 Jumlah Data dan Informasi	470,870,682.04	30 Jumlah Data dan Informasi	1,288,084,262.44	
					Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA		11 Rekomendasi	724,443,424.00	11 Rekomendasi	796,887,766.40	11 Rekomendasi	876,576,543.04	33 Rekomendasi	2,397,907,733.44	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	186,742,012.00	3 Rekomendasi	205,416,213.20	3 Rekomendasi	225,957,834.52	9 Rekomendasi	618,116,059.72	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	4 Dokumen	4 Dokumen	192,006,712.00	4 Dokumen	211,207,383.20	4 Dokumen	232,328,121.52	12 Dokumen	635,542,216.72	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD								PD Penanggung Jawab		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	406,922,712.00	406,922,712.00	4 Rekomendasi	447,614,983.20	447,614,983.20	4 Rekomendasi	492,376,481.52	12 Rekomendasi	1,346,914,176.72	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	188,629,012	188,629,012	6 Rekomendasi	207,491,913	207,491,913	6 Rekomendasi	228,241,104.52	18 Rekomendasi	624,362,029.72	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	4 Dokumen	4 Dokumen	197,142,612	197,142,612	4 Dokumen	216,856,873	216,856,873	4 Dokumen	238,542,561	12 Dokumen	652,542,046	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	535,814,412	535,814,412	5 Rekomendasi	589,395,853	589,395,853	5 Rekomendasi	648,335,439	15 Rekomendasi	1,773,545,704	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	9 rekomendasi	6 rekomendasi	6,503,252,048.00	6,503,252,048.00	6 rekomendasi	3,710,972,284.37	3,710,972,284.37	6 rekomendasi	4,350,000,000.00	6 rekomendasi	14,564,224,332.37	
					Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	31 data dan informasi	25 data dan informasi	339,226,224.00	339,226,224.00	25 data dan informasi	340,000,000.00	340,000,000.00	25 data dan informasi	350,000,000.00	25 data dan informasi	1,029,226,224.00	
					Jumlah Rekomendasi koordinasi perencanaan Bidang Kewilayahan	9 rekomendasi	6 rekomendasi	459,895,024.00	459,895,024.00	6 rekomendasi	964,846,211.32	964,846,211.32	6 rekomendasi	775,000,000.00	6 rekomendasi	2,199,741,235.32	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	5 rekomendasi	3 rekomendasi	102,344,612.00	102,344,612.00	3 rekomendasi	350,000,000.00	350,000,000.00	3 rekomendasi	400,000,000.00	3 rekomendasi	852,344,612.00	
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	5 dokumen	3 dokumen	169,611,612.00	169,611,612.00	3 dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	3 dokumen	210,000,000.00	3 dokumen	579,611,612.00	
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	5 rekomendasi	3 rekomendasi	6,400,907,436.00	6,400,907,436.00	3 rekomendasi	3,360,972,284.37	3,360,972,284.37	3 rekomendasi	3,950,000,000.00	3 rekomendasi	13,711,879,720.37	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Kewilayahan	4 rekomendasi	3 rekomendasi	102,344,612.00	102,344,612.00	3 rekomendasi	465,000,000.00	465,000,000.00	3 rekomendasi	475,000,000.00	3 rekomendasi	1,042,344,612.00	
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Kewilayahan	4 dokumen	3 dokumen	169,614,612.00	169,614,612.00	3 dokumen	140,000,000.00	140,000,000.00	3 dokumen	140,000,000.00	3 dokumen	449,614,612.00	
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	4 rekomendasi	3 rekomendasi	357,550,412.00	357,550,412.00	3 rekomendasi	499,846,211.32	499,846,211.32	3 rekomendasi	300,000,000.00	3 dokumen	1,157,396,623.32	
		Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil keltibangan	Prosentase hasil keltibangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	n/a	3%	11,269,424,704	11,269,424,704	3%	6,405,000,000	6,405,000,000	3%	6,992,500,000	9%	24,666,924,704	Bappelitbangda
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 rekomendasi	2 rekomendasi	1,005,747,048	1,005,747,048	3 rekomendasi	1,250,000,000	1,250,000,000	4 rekomendasi	1,380,000,000	11 rekomendasi	3,635,747,048	
				Facilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	0	0	0	0	1 Rekomendasi	225,000,000	225,000,000	1 Rekomendasi	225,000,000	1 Rekomendasi	450,000,000	

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD										PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Facilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	665,965,524	2 Rekomendasi	750,000,000	2 Rekomendasi	880,000,000	6 Rekomendasi	2,295,965,524			
				Facilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	0	0	0	0	0	0	0	1 Rekomendasi	0			
				Facilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	339,781,524	1 Rekomendasi	275,000,000	1 Rekomendasi	275,000,000	3 Rekomendasi	889,781,524			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi	1 rekomendasi	295,140,712	4 rekomendasi	1,175,000,000	4 rekomendasi	1,512,500,000	12 rekomendasi	2,982,640,712			
				Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	0	0	0	1 Rekomendasi	300,000,000	1 Rekomendasi	440,000,000	3 Rekomendasi	740,000,000			
				Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	1 Rekomendasi	275,000,000	1 Rekomendasi	275,000,000	3 Rekomendasi	550,000,000			
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	0	1 Rekomendasi	275,000,000	1 Rekomendasi	385,000,000	3 Rekomendasi	660,000,000			
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	295,140,712	1 Rekomendasi	325,000,000	1 Rekomendasi	412,500,000	3 Rekomendasi	1,032,640,712			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 rekomendasi	5 rekomendasi	1,725,062,072	7 rekomendasi	1,830,000,000	5 rekomendasi	1,530,000,000	16 rekomendasi	5,085,062,072			
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 rekomendasi	1 rekomendasi	321,481,524	1 rekomendasi	150,000,000.00	0	0.00	1 rekomendasi	471,481,524			
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0.00	1 rekomendasi	450,000,000.00	0	0.00	1 rekomendasi	450,000,000			
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	322,041,524.00	2 rekomendasi	580,000,000.00	2 rekomendasi	880,000,000.00	5 rekomendasi	1,782,041,524			
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 rekomendasi	2 rekomendasi	794,949,024.00	2 rekomendasi	400,000,000.00	2 rekomendasi	400,000,000.00	6 rekomendasi	1,594,949,024			
				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 rekomendasi	1 rekomendasi	286,590,000.00	0	0.00	0	0.00	1 rekomendasi	286,590,000			
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	0	0.00	1 rekomendasi	250,000,000.00	1 rekomendasi	250,000,000.00	2 rekomendasi	500,000,000			
				Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	n/a	11 OPD	8,243,474,872	11 OPD	2,150,000,000	11 OPD	2,570,000,000	33 OPD	12,963,474,872			

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	7,210,470,424.00	1 rekomendasi	550,000,000.00	1 rekomendasi	550,000,000.00	3 rekomendasi	8,310,470,424		
					Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dibangun	1 demplot	1 demplot						1 demplot			
					Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dipelihara				1 demplot		1 demplot		1 demplot			
				Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah rekomendasi hasil difusi inovasi dan penerapan teknologi	0	0	0.00	1 rekomendasi	40,000,000.00	1 rekomendasi	400,000,000.00	3 rekomendasi	440,000,000		
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	3 jenis	3 jenis	152,006,512.00	3 jenis	300,000,000.00	3 jenis	300,000,000.00	3 jenis	752,006,512		
				Sosialisasi dan diseminasi hasil keltibangan	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	7 penelitian	7 penelitian	124,803,912.00	7 penelitian	325,000,000.00	7 penelitian	385,000,000.00	21 penelitian	834,803,912		
				fasilitasi hak kekayaan intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dan didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM	2 produk	2 produk	756,194,024.00	3 produk	935,000,000.00	3 produk	935,000,000.00	9 produk	2,626,194,024		
Grandtotal									74,454,208,827.00		74,590,865,397.87		79,302,218,104.55		228,347,292,329.42	

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Perumusan indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang kemudian diidentifikasi sesuai bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tabel T-C 28

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran sampai kegiatan yang telah diukur, telah berhasil dicapai atau tidak.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintahan								
A.	Urusan Perencanaan							
1.	Tingkat konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat Konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	96%	96%	96,5%	97%	97%
3.	Prosentase Indikator Program Pembangunan daerah dengan tingkat	Tidak ada data	92%	92%	92,5%	92,5%	93%	93%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	capaian hasil (Outcome) minimal 75%							
5.	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	0	0	0	100%
B.	Urusan Penelitian dan Pengembangan							
1.	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi	Tidak ada data	0	0	20%	30%	40%	40%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	20%	20%	20%	0	0	0	20%
3.	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan Iptek Daerah	8 Rekomendasi	9	9	0	0	0	18

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai Bidang Urusannya berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	
Penunjang Urusan								
Perencanaan Pembangunan								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	
	telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA							
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan								

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	
7.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	20	100	100	100	100	100
10.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	50	50	50	50	50

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra (Rencana Strategis) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 berada pada tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Selanjutnya, Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kemudian, Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018 – 2023 agar dapat mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Bappelitbangda juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda pada setiap tahunnya dengan agenda utama yaitu perencanaan pembangunan guna mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Dengan melihat perubahan struktur organisasi perangkat daerah dan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka dilakukan revisi muatan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Adapun perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2018-2023 dapat dijadikan sebagai acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappelitbangda


sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan harapan semua unit kerja dapat melaksanakan secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Lembaga, unit kerja dan pegawai.

Dengan demikian, keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Makassar,

2021

Plt. KEPALA BAPPSELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN


Ir. Darmawan Bintang, M.Dev., Plg
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670427 199303 1 015